



BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 23 /KPTS/2026
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026-2029

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa indikator kinerja utama perangkat daerah merupakan alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang menjadi dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
- b. bahwa untuk menjamin keselarasan antara perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan, serta evaluasi kinerja perangkat daerah, perlu ditetapkan indikator kinerja utama perangkat daerah tahun 2026–2029;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati menetapkan indikator kinerja utama untuk Perangkat Daerah dan Unit Kerja Mandiri di bawahnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Gunungkidul tentang Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2026-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025–2029;
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2025;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026-2029.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2026-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan untuk:
- a. perencanaan tahunan;
 - b. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
 - c. pelaporan akuntabilitas kinerja;
 - d. evaluasi kinerja; dan
 - e. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 2 Januari 2026



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 23 /KPTS/2026
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026-2029

1. SEKRETARIAT DAERAH

Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan seluruh satuan kerja perangkat daerah
Indikator Kinerja Utama :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien		Indeks Reformasi Birokrasi General (Indeks)	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) General adalah skor yang diberikan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi pada suatu instansi pemerintah, fokus pada tata kelola pemerintahan berbasis digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif, serta budaya birokrasi yang BerAKHLAK dan ASN yang profesional.	Formulasi Perhitungan: Nilai Indeks Reformasi Birokrasi General dikeluarkan oleh Kemenpan RB Interpretasi: Semakin tinggi nilai Indeks Reformasi Birokrasi General, maka pelayanan publik akan semakin baik, birokrasi akan semakin bersih dan akuntabel, serta tata kelola pemerintahan akan semakin efektif dan efisien	Sekretariat Daerah	Penilaian Kemenpan RB melalui Bagian Organisasi

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) (Skor)	Nilai yang diberikan kepada pemerintah daerah sebagai hasil dari proses evaluasi terhadap kinerja makro dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencerminkan seberapa efektif dan efisien pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta dalam mencapai tujuan otonomi daerah.	Formulasi Perhitungan: Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (KPPD) sebagai hasil akhir dari EPPD (Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah). Dengan rumus sebagai berikut: $KPPD = [CKM + CKUP] \times 0,75 + [PKM] \times 0,25$ Keterangan: - KPPD = Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah - CKM = Capaian Kinerja Makro (diperoleh melalui akumulasi) - CKUP = Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan (diperoleh melalui akumulasi) - PKM = Perubahan Kinerja Makro (diperoleh melalui akumulasi) Catatan Tambahan Mengenai CKUP: Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan (CKUP) sendiri memiliki rumus penghitungan yang lebih rinci, yaitu total hasil kali nilai capaian kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) dengan bobot IKK, kemudian dikalikan dengan bobot variabel urusan pemerintahan : $CKUP = [\sum_n (nckup_n \times biup_n)] \times bvup$	Sekretariat Daerah	Penilaian Kemendagri melalui Bagian Pemerintahan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (t-2) dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia	Keterangan : nckiup = nilai capaian kinerja IKK ke-n biup = bobot IKK urusan pemerintahan bvup = bobot variabel urusan pemerintahan Interpretasi: Semakin tinggi nilai EPPD semakin baik kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah		
		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (%)	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif digunakan untuk mengukur tingkat pelaksanaan pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif.	Formulasi Perhitungan: (Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif / Jumlah seluruh pengadaan) x 100% Keterangan: Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif = jumlah paket pengadaan yang dilakukan dengan metode pemilihan penyedia barang/jasa secara kompetitif melalui <i>e-purchasing</i>, tender cepat dan tender. Jumlah seluruh pengadaan = seluruh pengadaan baik metode kompetitif dan nonkompetitif (swakelola) Pemerintah dari seluruh perangkat daerah yang ada sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa	Sekretariat Daerah	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				Interpretasi: Persentase ini menggambarkan tingkat persaingan dalam pengadaan barang dan jasa. Semakin tinggi persentasenya, semakin banyak pengadaan yang dilakukan melalui proses yang terbuka dan kompetitif, yang mengindikasikan adanya upaya untuk mendapatkan penawaran terbaik dari berbagai penyedia. Sebaliknya, persentase yang rendah bisa jadi menunjukkan adanya ketergantungan pada beberapa penyedia atau metode pengadaan lain yang kurang kompetitif		
		Persentase Capaian Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Daerah (%)	Rerata antara persentase capaian fisik daerah dan persentase capaian keuangan daerah	Formulasi Perhitungan: $(\text{Persentase capaian fisik daerah} + \text{Persentase capaian keuangan daerah}) / 2$ Interpretasi: Semakin tinggi nilai capaian evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran semakin baik kinerja realisasi anggaran daerah	Sekretariat Daerah	Data dari Bagian Administrasi Pembangunan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten (Indeks)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah indikator yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh perangkat daerah.	Formulasi Perhitungan: (Nilai IKM Kabupaten semester I + Nilai IKM Kabupaten semester II) / 2 dimana IKM dihitung dari: $IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Nilai Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ dimana bobot nilai rata-rata tertimbang dihitung dari: $\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot 1}}{\text{Jumlah Unsur 9}} = 0,11$ Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus : $IKM \text{ Unit Pelayanan} \times 25$ Interpretasi: Semakin tinggi nilai IKM Kabupaten semakin baik pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat	Sekretariat Daerah	Data dari Bagian Organisasi

2. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Tugas Pokok : Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

Indikator Kinerja Utama :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD (Indeks)	Nilai dari survei tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap kualitas layanan administrasi dan keuangan	Formulasi Perhitungan: $\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$ Dimana bobot nilai rata-rata tertimbang = Jumlah bobot dibagi jumlah unsur = 1 dibagi 9 = 0,11 Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus : IKM Unit Pelayanan x 25 Responden yang disurvei adalah seluruh anggota DPRD dan dilakukan tiap semester I dan II, nilai indeks diperoleh dari rerata hasil survei IKM semester I dan II Interpretasi: Semakin tinggi nilai maka semakin baik kualitas pelayanan administrasi dan keuangan Sekretariat DPRD terhadap anggota DPRD	Sekretariat DPRD	Laporan SKM Sekretariat DPRD

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Kualitas dukungan pelayanan Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD	Persentase terlaksananya dukungan tugas dan fungsi DPRD (%)	Rata-rata capaian terlaksananya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Formulasi Perhitungan: (Total dari persentase Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N + Persentase penetapan rancangan peraturan daerah tahun N + Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan)/3 - Persentase ketepatan penetapan Perda APBD Tahun N adalah Jumlah peraturan daerah APBD yang ditetapkan tepat waktu/ jumlah rancangan peraturan daerah APBD yang ditetapkan x 100% - Persentase penetapan rancangan peraturan daerah tahun N adalah Jumlah rancangan peraturan daerah yang ditetapkan tahun N. jumlah rancangan peraturan daerah dalam program pembentukan peraturan daerah yang ditetapkan tahun N x 100% - Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan adalah Jumlah laporan pengawasan penyelenggaran urusan pemerintah dan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah tahun N. Target laporan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah tahun N x 100% Interpretasi Semakin tinggi nilai maka semakin baik dukungan yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD	Sekretariat DPRD	Laporan Pengendalian Sekretariat DPRD

3. INSPEKTORAT DAERAH

Tugas Pokok : Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah

Indikator Kinerja Utama :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan		Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (Nilai)	Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.	Formulasi Perhitungan: Komponen penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi terdiri dari: a. Penetapan Tujuan untuk menilai kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis; b. Struktur dan Proses untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP; dan c. Pencapaian Tujuan untuk menilai pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP, yang terdiri dari efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Interval Skor Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP No Tingkat Maturitas Interval Skor 1. Rintisan $1,00 \leq \text{Skor} < 2,00$ 2. Berkembang $2,00 \leq \text{Skor} < 3,00$ 3. Terdefinisi $3,00 \leq \text{Skor} < 4,00$ 4. Terkelola dan Terukur $4,00 \leq \text{Skor} < 4,50$ 5. Optimum $\geq 4,50$	Inspektorat Daerah	Laporan Hasil Evaluasi SPIP Terintegrasi oleh BPKP

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGA INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				Interpretasi: Penjelasan karakteristik Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebagai berikut: 1. Tingkat Rintisan menunjukkan bahwa organisasi belum mampu mendefinisikan kinerjanya termasuk strategi pencapaian tujuan dan pengendaliannya; 2. Tingkat Berkembang menunjukkan bahwa organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik, namun strategi pencapaian kinerjanya masih belum relevan serta pelaksanaan pengendalian masih sebatas pemenuhan; 3. Tingkat Terdefinisi menunjukkan bahwa organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif; 4. Tingkat Terkelola dan Terukur menunjukkan organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi; 5. Tingkat Optimum menunjukkan bahwa organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, dengan struktur dan proses pengendalian telah efektif untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi serta adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (Skor)	Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif	Formulasi Perhitungan: Penilaian atas penerapan tata kelola APIP di Indonesia dengan mengacu kepada <i>Internal Audit Capability Model</i> mencakup penilaian terhadap enam elemen yaitu : 1) Peran dan Layanan APIP (<i>Services and Role of Internal Auditing</i>); 2) Pengelolaan SDM (<i>People Management</i>); 3) Praktik Profesional (<i>Professional Practices</i>); 4) Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (<i>Performance Management and Accountability</i>); 5) Budaya dan Hubungan Organisasi (<i>Organizational Relationship and Culture</i>); 6) Struktur Tata Kelola (<i>Governance Structures</i>) Interpretasi: Penjelasan karakteristik level kapabilitas APIP sebagai berikut: 1. Level 1 (<i>Initial</i>) menunjukkan bahwa organisasi APIP telah terbentuk dan telah memiliki mandat untuk melakukan pengawasan intern; 2. Level 2 (<i>Infrastructure</i>) menunjukkan bahwa APIP telah melaksanakan mandat pengawasan dengan kualifikasi dan kompetensi SDM yang memadai;	Inspektorat Daerah	Laporan Hasil Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah oleh BPKP

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				3. Level 3 (<i>Integrated</i>) menunjukkan bahwa APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan (<i>assurance dan consulting</i>) sesuai dengan standar dan praktik profesional. Dalam kondisi ini, hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketataan dan 3E, peringatan dini dan peningkatan efektivitas MR, serta perbaikan tata kelola Pemerintah Daerah; 4. Level 4 (<i>Managed</i>) menunjukkan bahwa APIP secara berkelanjutan telah menjadi mitra strategis bagi Pemerintah Daerah dan hasil pengawasan APIP terkait tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian (GRC) telah menunjukkan adanya evaluasi perbaikan kualitas pengawasan secara terus-menerus untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. 5. Level 5 (<i>Optimizing</i>) menunjukkan bahwa APIP telah mampu memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan organisasi dalam bentuk pencapaian efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan		

4. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH

Tugas Pokok : Melaksanakan urusan penunjang pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan serta mengkoordinasikan perencanaan dan pengendalian penugasan urusan keistimewaan

Indikator Kinerja Utama :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta peningkatan peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah		Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan (Indeks)	Mengukur keselarasan antara dokumen perencanaan dan kesesuaian capaian kinerja pelaksanaan Pembangunan	Formulasi Perhitungan: Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan = $\{(60\% \times A) + (40\% \times B)\} \times 100$ Keterangan: A = Keselarasan antar dokumen perencanaan (persentase Keselarasan program RKPD dengan RPJMD) B = capaian program RKPD (Persentase capaian kinerja RKPD terhadap target kinerja RKPD) Interpretasi: Keselarasan dokumen perencanaan dapat membantu dalam menilai efektivitas perencanaan pembangunan daerah dan mengidentifikasi area perbaikan. Jika antar dokumen selaras semakin naik, kualitas perencanaan pembangunan dan kesesuaian capaian kinerja pelaksanaan pembangunan juga tinggi.	Bidang Perencanaan dan Bidang Riset, Inovasi Daerah, dan Pengendalian	RPJMD, RKPD, dan Aplikasi SIPANDA

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Indeks Inovasi Daerah (Indeks)	Menunjukkan hasil Inovasi daerah yang terverifikasi berdasarkan penilaian dari Kemendagri	Formulasi Perhitungan: Jumlah total nilai inovasi daerah yang terverifikasi berdasarkan penilaian dari Kemendagri Interpretasi: Semakin terpenuhinya komponen kategori penilaian dari Kemendagri maka nilai indeks inovasi daerah semakin tinggi	Bidang Riset, Inovasi Daerah, dan Pengendalian	SK Kemendagri tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun n
	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan Daerah (%)	Menghitung rerata capaian: 1. Persentase kesesuaian program RKPD terhadap RPJMD Definisi operasional: Menghitung rerata capaian realisasi program perencanaan RKPD terhadap RPJMD	Formulasi Perhitungan Rerata: 1. Jumlah program RKPD dibagi program RPJMD x100% 2. Rerata capaian program RKPD 3. Rerata dari: a. Jumlah program Renja PD dibagi jumlah program di RKPD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan x 100% b. Jumlah program Renja PD dibagi jumlah program di RKPD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia x 100% c. Jumlah program Renja PD dibagi jumlah program di RKPD pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) x 100%	Bidang Perencanaan, Bidang Riset, Inovasi Daerah, dan Pengendalian, Bidang Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Kebudayaan	RPJMD, RKPD, RENJA PD dan Aplikasi SIPANDA

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			2. Persentase capaian kinerja RKPD terhadap target kinerja RKPD Definisi operasional: Menghitung rerata capaian realisasi evaluasi pembangunan daerah 3. Persentase keselarasan Renja PD dengan RKPD pada Program sektoral (Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam); dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Definisi operasional: Menghitung rerata kesesuaian program sektoral Renja PD dengan program sektoral RKPD	Interpretasi: Jika antara program RKPD sesuai dengan program RPJMD maka persentase kesesuaiannya tinggi dan kesesuaian capaian kinerja pelaksanaan pembangunan juga tinggi serta jika dokumen Renja PD selaras dengan dokumen RKPD maka persentase keselarasan tinggi		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Meningkatnya peran serta riset, penelitian dan inovasi dalam memberikan rekomendasi kebijakan daerah	Persentase rekomendasi kebijakan Pembangunan daerah yang disusun berdasarkan hasil riset, penelitian dan inovasi (%)	Menunjukkan persentase <i>policy brief</i> atas penelitian dibagi kajian yang telah dilaksanakan Bapperida.	Formulasi Perhitungan: Jumlah <i>policy brief</i> yang disusun dibagi Jumlah kajian yang dilaksanakan x 100% Interpretasi: Semakin banyak hasil <i>policy brief</i> yang diimplementasikan semakin baik	Bidang Riset, Inovasi Daerah, dan Pengendalian	Hasil penelitian kerjasama yang dilakukan Bapperida (Bidang Riset, Inovasi Daerah, dan Pengendalian) dengan Lembaga peneliti

5. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH

Tugas Pokok : Melaksanakan urusan penunjang pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan

Indikator Kinerja Utama :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Terwujudnya Profesionalitas ASN serta Meningkatnya Pengetahuan, Keahlian dan Keterampilan ASN		Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya.	Rumus : Jumlah nilai dari aspek kualifikasi, aspek kompetensi, aspek kinerja dan aspek disiplin, atau Nilai kualifikasi + Nilai kompetensi+ Nilai kinerja+ Nilai disiplin. Interpretasi: Semakin tinggi indeks profesionalitas ASN maka semakin banyak ASN yang profesional di suatu instansi	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	Penilaian IP ASN BKN
	Terwujudnya Profesionalitas Manajemen ASN	Indeks kualitas pengelolaan manajemen ASN (Indeks)	Ukuran terstandar yang digunakan untuk menilai kesesuaian tata kelola manajemen ASN dalam suatu instansi pemerintah berdasarkan norma, standar, prosedur	Formulasi Perhitungan: Jumlah nilai dari 18 elemen. Elemen yang dinilai : 1. Perencanaan Kebutuhan ASN 2. Pengadaan ASN 3. Pengangkatan ASN 4. Pangkat 5. Mutasi 6. Jabatan 7. Pengembangan Karir ASN 8. Pola Karir	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	Penilaian INDEKS NSPK BKN

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			dan kriteria oleh Badan Kepegawaian Negara	9. Penggajian, Tunjangan dan Fasilitas 10. Penghargaan 11. Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua 12. Perlindungan 13. Penilaian Kinerja 14. Cuti 15. Kode Etik 16. Disiplin 17. Pemberhentian 18. Pensiun. Interpretasi: Semakin tinggi indeks kualitas menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan manajemen ASN semakin baik		
	Aparatur yang kompeten sesuai dengan standar kompetensi jabatan	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional (%)	Ukuran statistik yang digunakan untuk melihat capaian ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi	Formulasi Perhitungan: Dihitung berdasarkan hasil rata-rata capaian dari: 1. Persentase ASN yang lulus diklat manajerial; 2. Persentase ASN yang lulus diklat teknis; 3. Persentase ASN yang mengajukan ijin tugas belajar; 4. Persentase CPNS yang lulus Diklatsar. Interpretasi: Tinggi rendahnya presentase menunjukkan tingkat kelulusan ASN yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	Laporan Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah

6. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Tugas Pokok : Melaksanakan urusan penunjang pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Indikator Kinerja Utama :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien dan akuntabel		Indeks pengelolaan keuangan dan aset daerah (%)	Indek Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah sebuah alat ukur atau indikator kinerja yang digunakan untuk menilai seberapa baik pengelolaan keuangan dan aset milik daerah, yang diukur dengan ketepatan waktu penetapan APBD, peningkatan persentase pengajuan SP2D yang terverifikasi, ketepatan waktu penyampaian LKPD ke BPK, dan peningkatan kualitas pengelolaan BMD serta peningkatan persentase PAD yang dikelola terhadap pendapatan asli daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dihitung berdasarkan hasil rata-rata capaian dari: 1. Persentase peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah; 2. Persentase peningkatan kualitas pengelolaan BMD; dan 3. Persentase PAD yang dikelola terhadap pendapatan asli daerah. Interpretasi: Semakin tinggi indeks pengelolaan keuangan daerah maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah semakin baik. • Lebih dari 95% : Sangat Baik • 90% - 95% : Baik • 80% - <90% : Cukup • < 80% : Kurang	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Laporan Keuangan BKAD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA															
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah (%)	Persentase peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah merupakan perhitungan rata- rata dari Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu, Persentase pengajuan SP2D yang terverifikasi dan Persentase penyampaian LKPD ke BPK tepat waktu	Formulasi Perhitungan: Dihitung berdasarkan Rata-rata (Penetapan APBD tepat waktu + Persentase pengajuan SP2D yang terverifikasi + Penyampaian LKPD ke BPK tepat waktu) Interpretasi: Semakin tinggi persentase maka kualitas pengelolaan keuangan daerah semakin baik Meta Indikator: <table><tr><td>No.</td><td>Nilai Angka</td><td>Kategori</td></tr><tr><td>1.</td><td>>95%</td><td>Sangat baik</td></tr><tr><td>2.</td><td>>90-95%</td><td>Baik</td></tr><tr><td>3.</td><td>>80-90%</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>4.</td><td>≤80%</td><td>Kurang</td></tr></table>	No.	Nilai Angka	Kategori	1.	>95%	Sangat baik	2.	>90-95%	Baik	3.	>80-90%	Cukup	4.	≤80%	Kurang	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Noreg dari Biro Hukum Pemda DIY Register SP2D Berita Acara Penyerahan LKPD ke BPK
	No.	Nilai Angka	Kategori																		
1.	>95%	Sangat baik																			
2.	>90-95%	Baik																			
3.	>80-90%	Cukup																			
4.	≤80%	Kurang																			
	Meningkatnya kualitas pengelolaan BMD	Persentase peningkatan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) (%)	Kualitas pengelolaan BMD ditentukan dari kegiatan: 1. Pengamanan adalah tindakan pencegahan dan perlindungan atas kepemilikan/ penguasaan barang milik daerah secara administrasi, fisik dan hukum dilengkapi bukti secara legal dan formal;	Formulasi Perhitungan: Dihitung berdasarkan Rata-rata (Persentase kendaraan berdokumen lengkap + Persentase BMD yang dimanfaatkan + Persentase BMD yang diamankan) Keterangan: Persentase kendaraan berdokumen lengkap = (Jumlah dokumen lengkap dibagi Jumlah kendaraan BMD) x 100% Persentase BMD yang dimanfaatkan = (Jumlah BMD yang dimanfaatkan dibagi Jumlah BMD yang seharusnya dapat dimanfaatkan) x 100%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah															

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA																		
			2. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Kualitas pengelolaan BMD didasarkan atas nilai Persentase peningkatan Kualitas pengelolaan BMD yang merupakan perhitungan rata-rata dari persentase kendaraan berdokumen lengkap, persentase BMD yang diamankan dan persentase BMD yang dimanfaatkan.	Persentase BMD yang diamankan = (Jumlah BMD yang diamankan dibagi Jumlah BMD yang perlu diamankan) x 100% Interpretasi: Semakin tinggi persentase, kualitas pengelolaan BMD semakin baik Meta indikator <table><tr><td>No.</td><td>Nilai Angka</td><td>Kategori</td></tr><tr><td>1.</td><td>>90-100%</td><td>Sangat Tinggi</td></tr><tr><td>2.</td><td>>75-90%</td><td>Tinggi</td></tr><tr><td>3.</td><td>>65-75%</td><td>Sedang</td></tr><tr><td>4.</td><td>>50-65%</td><td>Rendah</td></tr><tr><td>5</td><td>≤50%</td><td>Sangat rendah</td></tr></table>	No.	Nilai Angka	Kategori	1.	>90-100%	Sangat Tinggi	2.	>75-90%	Tinggi	3.	>65-75%	Sedang	4.	>50-65%	Rendah	5	≤50%	Sangat rendah		
No.	Nilai Angka	Kategori																						
1.	>90-100%	Sangat Tinggi																						
2.	>75-90%	Tinggi																						
3.	>65-75%	Sedang																						
4.	>50-65%	Rendah																						
5	≤50%	Sangat rendah																						

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA															
	Meningkatnya pendapatan asli daerah yang dikelola	Persentase PAD yang Dikelola terhadap Pendapatan Asli Daerah (%)	Menunjukkan proporsi pendapatan yang dihasilkan oleh daerah itu sendiri dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Semakin tinggi persentase ini, semakin mandiri keuangan daerah tersebut.	Formulasi Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah PAD yang dikelola}}{\text{Jumlah PAD}} \times 100\%$ Interpretasi: Semakin tinggi persentase, semakin mandiri keuangan daerah. Meta Indikator: <table><tr><th>No.</th><th>Nilai Angka</th><th>Kategori</th></tr><tr><td>1.</td><td>>75-100%</td><td>Sangat Tinggi</td></tr><tr><td>2.</td><td>>50-75%</td><td>Tinggi</td></tr><tr><td>3.</td><td>>25-50%</td><td>Sedang</td></tr><tr><td>4.</td><td>≤25%</td><td>Rendah</td></tr></table>	No.	Nilai Angka	Kategori	1.	>75-100%	Sangat Tinggi	2.	>50-75%	Tinggi	3.	>25-50%	Sedang	4.	≤25%	Rendah		Lapoan LRA BKAD ; Laporan LRA Pemda; Laporan Keuangan BKAD; Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
No.	Nilai Angka	Kategori																			
1.	>75-100%	Sangat Tinggi																			
2.	>50-75%	Tinggi																			
3.	>25-50%	Sedang																			
4.	≤25%	Rendah																			

7. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang kesatuan bangsa dan politik

Indikator Kinerja Utama :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM.		Indeks Harmoni Indonesia (Indeks)	Indeks yang menilai tingkat harmoni sosial, budaya, ekonomi, dan keagamaan pada tingkat kabupaten/kota	Formulasi Perhitungan: Rumus IHaI (<i>direct Measurement</i>) $IHaI = k1.X1 + k2.X2$ dan seterusnya $k8.X8$. lihat hasil Xi nya lihat bobotnya Interpretasi: Semakin tinggi Indeks Harmoni Indonesia menunjukkan peningkatan harmoni sosial, budaya, ekonomi, dan keagamaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Skor Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) yang dirilis Dirjen Polpum Kemendagri
	Meningkatnya pemahaman anggota parpol dan ormas terhadap Pancasila dan bela negara melalui pendidikan politik	Persentase partai politik, ormas yang melaksanakan sosialisasi bela negara dan wawasan kebangsaan (%)	Persentase partai politik, ormas yang melaksanakan sosialisasi bela negara dan wawasan kebangsaan	Formulasi Perhitungan: Jumlah ormas dan parpol yang menyelenggarakan dan mendapatkan pendidikan politik dibagi seluruh parpol dan ormas x 100% Interpretasi: Semakin tinggi pemahaman masyarakat tentang bela negara dan wawasan kebangsaan yang dilaksanakan oleh partai politik dan organisasi masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Meningkatnya ketahanan Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Pertahanan Keamanan Masyarakat	Persentase konflik sosial yang tertangani (%)	Persentase konflik sosial yang tertangani	Formulasi Perhitungan: Jumlah konflik yang tertangani dibagi jumlah konflik yang terjadi x 100% Interpretasi: Semakin tinggi persentase menunjukkan konflik sosial yang tertangani semakin tinggi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

8. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Tugas Pokok : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran

Indikator Kinerja Utama :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatkan ketangguhan daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana, serta dalam mengurangi risiko bencana		Persentase Penurunan Indeks Risiko Bencana (%)	Persentase Penurunan Indeks Risiko Bencana mengukur penurunan tingkat risiko bencana dengan mempertimbangkan berbagai faktor bencana dan mengacu pada nilai Indeks Risiko Bencana	Formulasi Perhitungan: $\frac{\Sigma (\text{Nilai IRB Sebelum-IRB Sekarang})}{\Sigma \text{ Nilai IRB sebelumnya}} \times 100$ Interpretasi: Semakin rendah nilai Indeks Resiko Bencana, semakin tinggi persentase penurunan yang tercapai. Semakin tinggi persentase penurunan IRB maka tingkat risiko bencana semakin rendah.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Resiko Bencana yang dirilis oleh BNPB setiap tahun
	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) (Angka)	Penilaian IKD dilaksanakan dengan metode diskusi terfokus (<i>Focus Group Discussion</i>) terkait daftar isian (kuesioner) yang isi jawabannya disepakati bersama oleh <i>multistakeholders</i> yang disesuaikan dengan jenis dan karakter ancaman bencana di wilayah tersebut	Formulasi Perhitungan: IKD didapatkan dari isian daftar pertanyaan dalam 7 parameter Indeks Ketahanan Daerah. Dalam 7 parameter IKD sendiri terdapat 7 Prioritas dan 71 Indikator. Setiap indikator diturunkan menjadi 4 pertanyaan kunci, sehingga total ada 284 pertanyaan kunci. Setiap pertanyaan kunci wajib disertakan bukti verifikasi (<i>evidence</i>) seperti salinan peraturan, dokumentasi kegiatan, daftar hadir, dokumen anggaran, dan lain-lain.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Ketahanan Daerah yang dirilis oleh BNPB setiap tahun

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Hasil penilaian IKD kemudian ditindaklanjuti menjadi rekomendasi dan kebijakan strategis untuk meningkatkan ketahanan daerah yang secara langsung berdampak pada penurunan IRBI	Interpretasi: Semakin besar nilai Indeks Ketahanan Daerah yang dihasilkan diartikan semakin baik kapasitas Penanggulangan Bencana di Daerah		

9. DINAS KESEHATAN

Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kesehatan

Indikator Kinerja Utama :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Indeks SPM (Indeks)	Penghitungan pencapaian SPM Kesehatan sesuai dengan standar dilakukan dengan menggunakan indeks pencapaian SPM yang meliputi 2 aspek yaitu pencapaian mutu layanan dasar (barang, jasa dan sumber daya manusia) dan pencapaian penerima layanan dasar. Capaian Mutu Pelayanan Dasar merupakan capaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub indikator kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan standar teknis. Capaian penerima pelayanan dasar merupakan capaian yang diperoleh melalui target dan indikator kinerja	Formulasi Perhitungan: % Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar x Bobot mutu minimal layanan dasar (20) + % Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar x Bobot Penerima layanan dasar (80) Interpretasi: SPM Kesehatan merupakan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam urusan kesehatan yang menjadi penilaian kinerja daerah dalam memberikan Pelayanan Dasar kepada warga negara dan merupakan bahan Pemerintah Pusat dalam perumusan kebijakan nasional, pemberian insentif, disinsentif dan sanksi administrasi Kepala Daerah. Semakin tinggi indeks menunjukkan kinerja pelayanan kesehatan dasar semakin baik.	Dinas Kesehatan	Puskesmas, Dinas Kesehatan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Kualitas dan akses pelayanan Kesehatan Meningkat	Prevalensi stunting (%)	Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010. a. Sangat pendek: Zscore < -3,0 b. Pendek: Zscore ≥ -3,0 s/d Zscore < -2,0	Formulasi Perhitungan: Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). $P \text{ AB (5) } P \text{ stunting} = \frac{J \text{ AB (5) } P \text{ stunting}}{J \text{ AB (5)}} \times 100\%$ Keterangan PAB(5) P: Prevalensi anak balita yang stunting menderita pendek (stunting) JAB(5)P stunting: Jumlah anak balita pendek (stunting) pada waktu tertentu. JAB (5) Jumlah anak balita pada waktu yang sama. Interpretasi: Prevalensi stunting yang tinggi di suatu wilayah menggambarkan beberapa masalah serius, termasuk: 1. Kekurangan Gizi: Stunting adalah indikator kekurangan gizi kronis. Prevalensi stunting yang tinggi menunjukkan bahwa banyak anak di wilayah tersebut menderita kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama.	Dinas Kesehatan	Survei Status Gizi Indonesia (SSGI)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				2. Akses Pelayanan Kesehatan: Prevalensi stunting yang tinggi dapat mencerminkan akses yang terbatas ke pelayanan kesehatan berkualitas, termasuk pelayanan gizi dan kesehatan ibu dan anak. 3. Kemiskinan: Stunting sering kali terkait dengan kemiskinan. Keluarga yang miskin mungkin tidak mampu menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak mereka, yang pada gilirannya dapat menyebabkan stunting. 4. Pendidikan: Tingkat pendidikan orang tua, khususnya ibu, juga berpengaruh terhadap prevalensi stunting. Orang tua yang berpendidikan cenderung lebih memahami pentingnya gizi dan kesehatan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. 5. Faktor Lingkungan: Faktor lingkungan seperti sanitasi yang buruk dan akses terbatas ke air bersih juga dapat berkontribusi terhadap prevalensi stunting.		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Jumlah Kematian Ibu (Kasus)	Kematian seorang wanita selama kehamilan atau dalam 42 hari setelah persalinan atau pengakhiran kehamilan, dari sebab apapun yang berkaitan dengan atau diperburuk oleh kehamilannya atau penanganannya, tetapi bukan dari sebab-sebab kecelakaan atau kebetulan	Formulasi Perhitungan: Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas atau estimasi pada waktu tertentu Interpretasi: Semakin rendah jumlah kasus kematian ibu menunjukkan sistem pelayanan kesehatan maternal berfungsi dengan sangat baik dan terpadu	Dinas Kesehatan	Maternal Perinatal Death Identification (MPDN) Kementerian Kesehatan
		Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis (%)	Persentase jumlah kasus TBC yang berhasil ditemukan dibandingkan dengan perkiraan jumlah kasus TBC dalam periode tertentu	Formulasi Perhitungan: Jumlah semua kasus TBC yang ditemukan selama periode tertentu dibagi dengan jumlah total kasus TBC yang diperkirakan selama periode tertentu dikali 100% Interpretasi: Cakupan penemuan kasus tuberkulosis menilai keberhasilan suatu wilayah dalam menemukan dan mendiagnosis kasus TBC yang diperkirakan ada di populasi. Indikator ini sangat penting untuk mengukur efektivitas program pengendalian TBC, karena langkah pertama untuk mengobati dan menghentikan langkah penularan adalah dengan menemukan kasusnya.	Dinas Kesehatan	Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB) Kementerian Kesehatan

10. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak

Indikator Kinerja Utama :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Terwujudnya Kesejahteraan Sosial, Pembangunan Gender dan Pemenuhan Hak Anak		Cakupan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat) yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Perlindungan, Jaminan Sosial, Dapat Hidup Mandiri dan Berfungsi Sosial (%)	PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Ada 17 jenis PPKS (anak balita terlantar, anak terlantar, anak dengan disabilitas, anak jalanan, anak korban tindak kekerasan, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas,	Formulasi Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah PPKS yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial}}{\text{Jumlah PPKS yang membutuhkan pelayanan}} \times 100\%$ Interpretasi: Indikator ini mengukur/menggambarkan persentase Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS) yang telah memperoleh layanan secara menyeluruh, meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, dan jaminan sosial, sehingga mampu hidup mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan sosial. Semakin tinggi persentase capaian indikator menunjukkan tingkat keberhasilan program dalam mengurangi kerentanan, meningkatkan kemandirian, serta mendorong integrasi sosial PPKS semakin tinggi.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Data PPKS diperoleh dari pendataan, pemutakhiran dan verval data PPKS yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak setiap tahun)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			tuna sosial, gelandangan, pengemis, pemulung, bekas warga binaan lembaga permasyarakatan, korban penyalahgunaan napza, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial, perempuan rawan sosial ekonomi dan keluarga bermasalah sosial psikologis.			
		Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	Alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kesetaraan gender dalam pembangunan suatu negara. IPG menghitung perbedaan pencapaian antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu: 1. Kesehatan: Diukur dengan angka harapan hidup saat lahir. 2. Pendidikan: Diukur dengan angka melek huruf dewasa dan tingkat partisipasi pendidikan dasar hingga tinggi. 3. Pendapatan: Diukur dengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita yang disesuaikan	Formulasi Perhitungan: $IPG = \frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ laki-laki}}$ Dimana : IPM = Indeks Pembangunan Manusia Nilai IPG yang mendekati atau sama dengan 100 menunjukkan bahwa capaian pembangunan perempuan hampir setara atau setara dengan laki-laki. Semakin tinggi nilai IPG, semakin kecil kesenjangan gender dalam kualitas hidup, yang berarti kebijakan dan program Pembangunan telah memberikan manfaat relative seimbang bagi kedua jenis kelamin.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Badan Pusat Statistik (BPS)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Terwujudnya kemandirian PPKS	Cakupan PPKS yang Dapat Hidup Mandiri dan Berfungsi Sosial (%)	PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar ada 17 jenis PPKS yang terdata	Formulasi Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah PPKS yang dapat mandiri}}{\text{Jumlah PPKS yang telah menerima bantuan}} \times 100\%$ Dimana : PPKS yang dievaluasi yaitu PPKS yang menerima bantuan (KUBE, UEP dan USEP) di tahun n-1 s/d n-3 Interpretasi: Indikator ini mengukur persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang telah mencapai kemandirian dalam memenuhi kebutuhannya serta mampu menjalankan peran dan fungsi sosial di masyarakat. Semakin tinggi capaian indikator mencerminkan keberhasilan program pemberdayaan dan pendampingan dalam mengurangi ketergantungan, meningkatkan kapasitas individu, serta mendorong partisipasi aktif PPKS dalam kehidupan bermasyarakat semakin tinggi	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Dinas sosial PPPA

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Terpenuhinya kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Cakupan PPKS Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Perlindungan Dan Jaminan Sosial (%)	PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar Ada 17 jenis PPKS yang terdata	Formulasi Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah PPKS yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial}}{\text{Jumlah PPKS}} \times 100\%$ Interpretasi: Indikator ini mengukur persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang telah memperoleh layanan pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, dan jaminan sosial sesuai standar pelayanan minimal. Semakin tinggi persentase capaian indikator menunjukkan tingkat keberhasilan program dalam memastikan PPKS berada pada kondisi terpenuhi hak-hak dasarnya, mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial semakin tinggi.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah (Indeks)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan indikator untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik	Formulasi Perhitungan: Hasil berdasarkan 10 unsur Survei Kepuasan Masyarakat yaitu: 1. persyaratan layanan 2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan 3. Waktu Penyelesaian Pelayanan 4. Biaya / Tarif 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelayanan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Hasil survey kepuasan masyarakat

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				7. Perilaku Pelaksana 8. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan Prasarana 10. Kedisiplinan Petugas dalam Memberikan Pelayanan IKM = (Total nilai rata-rata per unsur pelayanan x 0,1) x 25 Interpretasi: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perangkat Daerah menunjukkan tingkat persepsi dan penilaian masyarakat terhadap mutu pelayanan yang diberikan oleh perangkat daerah. Semakin tinggi nilai IKM, semakin baik kualitas pelayanan yang dirasakan oleh penerima layanan		
	Capaian Pemberdayaan Gender Meningkat	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Indeks)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana perempuan dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik, termasuk dalam pengambilan keputusan dan akses terhadap sumber daya ekonomi. IDG mengukur kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam bidang-bidang tersebut	Formulasi Perhitungan: $I(par) + I(dm) + I(Inc-des) / 3$ dimana : 1. I(par) = Indeks keterwakilan di parlemen 2. I(dm) = Indeks pengambilan keputusan 3. I(inc-des) = Indeks distribusi pendapatan Interpretasi: Indeks Pemberdayaan Gender menggambarkan tingkat kesetaraan dan peran aktif perempuan dalam kehidupan publik, terutama dalam bidang politik, ekonomi, dan kontrol sumber daya. Semakin tinggi IPG, semakin setara posisi perempuan dengan laki-laki dalam Pembangunan.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	BPS

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Pemenuhan hak anak Meningkat	Persentase Pemenuhan Hak Anak (%)	Pemenuhan hak anak adalah serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama masyarakat dan lembaga terkait untuk menjamin hak-hak anak dapat terpenuhi sesuai amanat Undang-Undang dan Konvensi Hak Anak	Formulasi Perhitungan: Fasilitasi hak anak yang diberikan oleh pemerintah daerah (5 hak anak KLA) / hak anak yang seharusnya diberikan x 100. Keterangan 5 hak anak dalam klaster KLA yaitu: 1. hak sipil dan kebebasan 2. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif 3. kesehatan dasar dan kesejahteraan 4. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya 5. perlindungan khusus anak Interpretasi: Persentase pemenuhan hak anak adalah alat ukur penting untuk melihat kualitas hidup anak-anak dalam suatu kabupaten. Interpretasi yang tepat membantu pemerintah dan masyarakat fokus memperbaiki aspek yang masih kurang, demi mewujudkan lingkungan yang benar-benar ramah dan aman bagi anak. Semakin tinggi persentase capaian indikator menunjukkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam memenuhi, melindungi, dan menghormati hak-hak anak secara menyeluruh, sekaligus mencerminkan efektivitas kebijakan, program, dan intervensi yang telah dilaksanakan dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

11. DINAS PENDIDIKAN

Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Pendidikan

Indikator Kinerja Utama :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya Derajat Pendidikan Penduduk		Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas (RLS 25+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut: a. Tidak punya ijazah = 0 tahun; b. SD = 6 tahun; c. SMP = 9 tahun; d. SMA = 12 tahun; e. D1/D2 = 14 tahun;	Formulasi Perhitungan: $RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$ Keterangan : RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun keatas Xi = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas Interpretasi: Rata-rata lama sekolah (RLS) mengukur lama (dalam tahun) pendidikan formal yang telah ditempuh penduduk usia 25 tahun keatas. Semakin tinggi RLS maka kualitas hidup masyarakat meningkat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik, kemampuan dan kesempatan kerja meningkat (pengangguran turun), serta pola pikir dan kebijakan pendidikan membaik.	Dinas Pendidikan	Susenas, Badan Pusat Statistik

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			f. D3 = 15 tahun; g. D4 = 16 tahun; h. S1 = 17 tahun; i. S2 = 19 tahun; j. S3 = 22 tahun. Konversi ijazah ke menjadi lamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini: 1. Tidak pernah sekolah = 0 tahun; 2. Masih sekolah di SD sampai dengan S1= konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1; 3. Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1; 4. Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir; Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir –1			

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang.	Formulasi Perhitungan: $\text{Harapan Lama Sekolah} = FK \sum_{i=7}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Keterangan: FK = Faktor koreksi pesantren E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang berkolah pada tahun t P_i^t = Jumlah penduduk usia i pada tahun t i = Usia (7, 8, ..., n) Interpretasi: Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu. Misal: HLS Indonesia pada tahun 2022 sebesar 13,10 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,10 tahun atau setara dengan Diploma I. Semakin tinggi HLS maka semakin besar peluang masyarakat untuk mengakses pendidikan formal yang lebih tinggi (SMA, D1/D3, S1/S2) meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan membuka kesempatan kerja lebih baik yang pada akhirnya dapat menurunkan angka pengangguran dan berkontribusi pada kemajuan Pembangunan Nasional	Dinas Pendidikan	Susenas, Badan Pusat Statistik

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan meningkat	Indeks SPM Bidang Pendidikan (Indeks)	Rumus perhitungan Indeks SPM Pendidikan tidak tunggal, tapi berbasis persentase pencapaian indikator mutu layanan dasar pendidikan terdiri dari beberapa indikator prioritas kabupaten/kota: 1) Angka Partisipasi Sekolah Usia 5-6; 2) Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-15 3) Kompetensi Literasi Murid; 4) Kompetensi Numerasi Murid; 5) Persentase PAUD Terakreditasi Minimal B ; 6) Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1 dan D IV; 7) Iklim Keamanan sekolah; 8) Iklim Kebinekaan sekolah; dan 9) Iklim Inklusivitas Sekolah. Indikator prioritas ini menjadi dasar Pemerintah Daerah dalam mengukur pemenuhan SPM bidang pendidikan. yang mengacu pada Permendagri No.59 Tahun 2021 dan Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022 untuk menghitung seberapa baik daerah memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan terintegrasi dalam	Formulasi Perhitungan: Indeks Capaian SPM = $\left\{ \begin{array}{l} \text{Persentase} \\ \text{pencapaian} \\ \text{mutu} \\ \text{minimal} \\ \text{layanan} \\ \text{dasar} \end{array} \right\} \times \begin{array}{l} \text{Bobot} \\ \text{Mutu} \\ (20\%) \end{array} + \left\{ \begin{array}{l} \text{Persentase} \\ \text{pencapaian} \\ \text{penerima} \\ \text{layanan} \\ \text{dasar} \end{array} \right\} \times \begin{array}{l} \text{Bobot} \\ \text{Penerima} \\ \text{layanan} \\ (80\%) \end{array}$ Keterangan: Indikator yang digunakan untuk menghitung SPM 1) Angka Partisipasi Sekolah Usia 5-6; 2) Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-15 3) Kompetensi Literasi Murid; 4) Kompetensi Numerasi Murid; 5) Persentase PAUD Terakreditasi Minimal B; 6) Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1 dan D IV; 7) Iklim Keamanan sekolah; 8) Iklim Kebinekaan sekolah; dan 9) Iklim Inklusivitas Sekolah. Interpretasi: Kategori capaian Indeks SPM Provinsi • 100 (Tuntas Paripurna) • 90-99 (Tuntas Utama) • 80-89 (Tuntas Madya) • 70-79 (Tuntas Pratama) • 60-69 (Tuntas Muda) • <60 (Belum Tuntas)	Dinas Pendidikan	Rapor Pendidikan yang dirilis oleh Kemendikdasmen pada bulan Juli (tahun berjalan), https://raporpendidikan.kemendikdasmen.go.id

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Rapor Pendidikan Daerah untuk mengukur mutu layanan dasar	Semakin tinggi nilai capaian SPM tingkatan nilai kategori naik dan baik di level provinsi maupun Nasional, beriringan dengan semakin tinggi nilai capaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) bidang pendidikan, artinya kualitas dan akses layanan pendidikan di suatu daerah semakin baik, menjamin hak pendidikan yang setara, meningkatkan mutu SDM, daya saing daerah, dan membantu pengentasan kemiskinan, karena pemenuhan SPM memastikan layanan dasar pendidikan terpenuhi sesuai standar, mengarah pada peningkatan kompetensi literasi, numerasi, serta kepuasan dunia kerja terhadap lulusan	Dinas Pendidikan	

12. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tugas Pokok : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian.

Indikator Kinerja Utama :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Terwujudnya Tranformasi Digital untuk peningkatan kualitas pelayanan publik	Terwujudnya Tranformasi Digital untuk peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Pemerintah Digital (PEMDI) (Indeks)	Pemerintah digital merupakan penguatan kebijakan dari Indeks SPBE. Dimana target peran Pemdi sebagai pengungkit pembangunan 2025-2029, secara umum meliputi: 1) Mendukung penurunan kemiskinan melalui penguatan tata kelola data pemerintah yang terpadu, 2) Menciptakan iklim usaha yang kondusif berbasis teknologi, 3) Mewujudkan administrasi pemerintahan berbasis teknologi, seperti sistem pengadaan, sistem layanan aparatur negara, sistem kearsipan, sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, 4) Modernisasi teknologi sistem penerimaan negara, serta	Formulasi Perhitungan: Penilaian Indeks Pemdi dilakukan oleh Kementrian PAN RB dengan perhitungan berdasarkan 35 indikator yang dikelompokan menjadi 9 aspek Interpretasi: Nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan Rentang Indeks Predikat : 1 s.d. < 1,8 Kurang 1,8 s.d. < 2,6 Cukup 2,6 s.d. < 3,5 Baik 3,5 s.d. < 4,2 Sangat Baik 4,2 s.d. 5 Memuaskan Semakin tinggi nilai indeks domain dan bobot domain maka akan semakin besar pula nilai indeks PEMDI yang dihasilkan.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			5) Transformasi layanan publik yang berfokus pada kebutuhan masyarakat di setiap tahap kehidupan (layanan siklus hidup) Indeks Pemdi (Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital) memiliki 35 Indikator yang dikelompokkan menjadi 9 aspek.			
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Indeks)	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan. Adapun Definisi Operasional sesuai Kepmen PANRB No. 739 Tahun 2023.	Formulasi Perhitungan: Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan nilai indeks SPBE dijabarkan sebagai berikut: $Indeks\ Domain_i = \frac{1}{BD_i} \sum_{j=m}^n NA_{ij} \times BA_{ij}$ dimana: • NDj adalah nilai indeks domain ke-j; • BDj adalah nilai bobot domain ke-j.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Instrumen Evaluasi SPBE terdiri dari 4 (empat) Domain: 1. Domain Kebijakan Internal SPBE : 13,00% 2. Domain Tata Kelola SPBE : 25,00% 3. Domain Manajemen SPBE : 16,50% 4. Domain Layanan SPBE : 45,50%	Interpretasi: Nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat sebagai berikut: 4,2 – 5,0 Memuaskan 3,5 – < 4,2 Sangat Baik 2,6 – < 3,5 Baik 1,8 – < 2,6 Cukup 5. < 1,8 Kurang Semakin tinggi nilai indeks domain dan bobot domain maka akan semakin besar pula nilai indeks SPBE yang dihasilkan.		
	Terwujudnya Pemerintahan Digital yang inklusif, aman dan sehat	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) (Indeks)	Mengukur tingkat keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah Provinsi DIY	Formulasi Perhitungan: Nilai yang ditetapkan oleh Komisi Informasi Daerah Provinsi DIY terhadap keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Interpretasi: Semakin tinggi nilai yang diperoleh, pelaksanaan keterbukaan informasi publik adalah baik/ informatif	Dinas Komunikasi dan Informatika	Komisi Informasi Provinsi DIY

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Terwujudnya prinsip Satu Data Indonesia	Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Nilai)	Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral merupakan penilaian terhadap penyelenggaraan statistik sektoral yang dilaksanakan oleh BPS Pusat	Formulasi Perhitungan: Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh BPS Pusat Interpretasi: Semakin tinggi nilai yang diperoleh, pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral adalah baik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Badan Pusat Statistik Nasional
	Terwujudnya mitigasi ancaman keamanan siber	Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah (Sistem Elektronik) (Angka)	Nilai kematangan siber adalah nilai hasil penilaian terhadap sistem informasi/aplikasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara	Formulasi Perhitungan: Nilai Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah (Sistem Elektronik) dihitung berdasarkan indikator penilaian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara. Jumlah total sistem elektronik yang menjadi target pengamanan setiap tahun Interpretasi: Semakin banyak sistem informasi yang di <i>Penetration testing</i>, semakin aman Sistem Informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Badan Siber dan Sandi Negara

13. DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang Pekerjaan Umum dan bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman

Indikator Kinerja Utama :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas		Indeks Layanan Infrastruktur (Indeks)	Indeks gabungan yang mencerminkan kualitas layanan infrastruktur dari sektor pekerjaan umum dan kawasan permukiman.	Formulasi Perhitungan: Gabungan Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum sebesar 60% dan Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar 40% Interpretasi: Indeks ini merupakan ukuran komposit dan digunakan sebagai dasar evaluasi layanan infrastruktur secara menyeluruh. Semakin tinggi capaian indeks layanan infrastruktur maka kualitas layanan infrastruktur semakin baik	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Laporan Tahunan
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum (Indeks)	Nilai capaian kinerja infrastruktur dari sektor pekerjaan umum berdasarkan kontribusi capaian program prioritas.	Formulasi Perhitungan: 5% capaian program pengelolaan SDA + 20% capaian program pengelolaan dan pengembangan sitem penyediaan air minum + 20% capaian program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah + 5% capaian program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase + 10% capaian program penataan bangunan gedung + 25% capaian program penyelenggaraan jalan + 5% capaian program pengembangan jasa konstruksi Interpretasi: Indeks ini menggambarkan performa agregat dari tujuh aspek utama pekerjaan umum. Semakin tinggi capaian Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum maka kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum semakin baik	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Bidang Sumber Daya Air, Bidang Cipta Karya, Bidang Bina Marga)	Laporan Tahunan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman (Indeks)	Ukuran kinerja sektor perumahan dan permukiman berdasarkan capaian program prioritas terkait.	Formulasi Perhitungan: 20% capaian program pengembangan perumahan + 20% Capaian program kawasan permukiman + 20% capaian Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh + 20% capaian program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) + 20% capaian program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman Interpretasi: Indeks ini menggambarkan performa agregat dari lima aspek utama perumahan dan kawasan permukiman. Semakin tinggi capaian Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman maka kualitas Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman semakin baik	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman)	Laporan Tahunan

14. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Indikator Kinerja Utama :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Terwujudnya layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang efektif dan efisien		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (Nilai)	Hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Disdukcapil untuk mendapatkan skor nilai yang menunjukkan mutu pelayanan sebagai dasar perbaikan kebijakan dan peningkatan layanan admindukcapil	Formulasi Perhitungan: Nilai Rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat tahunan, dilaksanakan tiap semester I dan II, diperoleh dari hasil nilai rata-rata IKM pada seluruh jenis pelayanan yang disurvei. - Nilai IKM pada jenis pelayanan diperoleh dari nilai indeks komposit (gabungan) dari setiap unsur SKM. - Nilai Indeks Komposit untuk setiap jenis pelayanan = Jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur SKM dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,11 untuk 9 unsur. Interpretasi: IKM ditunjukkan dengan skor/angka (semakin tinggi nilai SKM semakin baik kinerja pelayanan) dengan interval: 25,00 - 64,99 Mutu D Kinerja Tidak Baik 65,00 - 76,60 Mutu C Kinerja Kurang Baik 76,61 - 88,30 Mutu B Kinerja Baik 88,31 - 100,00 Mutu A Kinerja Sangat Baik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Survei Kepuasan Masyarakat

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan Masyarakat	Indeks Tertib Administrasi Kependudukan (%)	Nilai yang mengukur capaian kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil Dokumen kependudukan terdiri atas kepemilikan KTP elektronik, KK dan KIA Dokumen pencatatan sipil terdiri atas akta kelahiran semua umur dan akta kematian	Formulasi perhitungan: $\sum [50\% \times (\text{cakupan KTP} + \text{cakupan KK} + \text{cakupan KIA})] + [50\% \times (\text{cakupan kepemilikan akta kelahiran} + \text{cakupan akta kematian})]$ - Cakupan KTP : Jumlah penduduk wajib KTP yang sudah memiliki KTP dibagi Jumlah penduduk wajib KTP x 100 - Cakupan KK: Jumlah KK yang diterbitkan dibagi Jumlah keseluruhan KK x 100 - Cakupan KIA Jumlah penduduk usia 0-17 tahun kurang sehari yang sudah memiliki KIA dibagi Jumlah penduduk usia 0-17 tahun kurang sehari x 100 - Cakupan kepemilikan akta kelahiran Jumlah penduduk yang sudah memiliki akta kelahiran dibagi Jumlah penduduk x 100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Laporan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Ditjen Dafdukcapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Ditjen Dafdukcapi Kementerian Dalam Negeri Ditjen Dafdukcapi

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				Cakupan kepemilikan akta kematian Jumlah akta kematian yang diterbitkan dibagi jumlah peristiwa kematian yang dilaporkan x 100 Interpretasi: Semakin tinggi Nilai capaian kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil menunjukkan tingkat ketertiban dan kepatuhan masyarakat/penduduk dalam administrasi kependudukan semakin baik.		Kementerian Dalam Negeri Ditjen Dafdukcapil

15. DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan dan olahraga.

Indikator Kinerja Utama :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya nilai tambah pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan, dan olahraga		Indeks nilai tambah pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan, dan olahraga (Indeks)	Mengukur kinerja pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan, dan olahraga di Kabupaten Gunungkidul	Formulasi Perhitungan: (Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum x 50%) + (Persentase Partisipasi Organisasi Kepemudaan yang Aktif x 25%) + (Persentase peningkatan prestasi olahraga x 25%) Interpretasi: Semakin tinggi indeks nilai tambah pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan dan olahraga, menunjukkan semakin baik kinerja pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan, dan olahraga di Kabupaten Gunungkidul	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga
	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Nilai Belanja Wisatawan Nusantara (Rp)	Nilai Belanja Wisatawan Nusantara	Formulasi Perhitungan: Nilai belanja wisatawan nusantara dihitung dari rata-rata hasil survei rata-rata belanja wisatawan nusantara Triwulan 1, 2, 3 dan 4 Interpretasi: Semakin besar nilai rata-rata belanja, semakin baik, karena menunjukkan bahwa wisatawan nusantara memberikan dampak ekonomi yang lebih tinggi bagi daerah	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga	Hasil Survei Belanja Wisatawan Nusantara Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Nilai Belanja Wisatawan mancanegara (Rp)	Nilai Belanja Wisatawan mancanegara	Formulasi Perhitungan: Nilai belanja wisatawan mancanegara dihitung dari rata-rata hasil survei rata-rata belanja wisatawan mancanegara Triwulan 1, 2, 3 dan 4 Interpretasi: Semakin besar nilai rata-rata belanja, semakin baik, karena menunjukkan bahwa wisatawan mancanegara memberikan dampak ekonomi yang lebih tinggi bagi daerah	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga	Hasil Survei Belanja Wisatawan Mancanegara Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga
		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi: 1. Penyediaan Akomodasi bagi Wisatawan, dan 2. Penyediaan Jasa Makan dan Minum.	Formulasi Perhitungan: $\frac{\text{Nilai tambah penyediaan akomodasi makan dan minum}}{\text{nilai PDRB Kabupaten}} \times 100\%$ Nilai tambah penyediaan akomodasi makan dan minum dibagi dengan nilai PDRB Kabupaten dikalikan 100% Interpretasi: Semakin besar nilai PDB yang dihasilkan oleh aktivitas terkait pariwisata, semakin tinggi proporsinya terhadap PDB regional, <i>ceteris paribus</i>.	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga	Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Meningkatnya prestasi olahraga	Persentase peningkatan prestasi olahraga (%)	Mengukur peningkatan prestasi olahraga	Formulasi Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah atlet berprestasi}}{\text{Jumlah nomor pertandingan yang diikuti}} \times 100\%$ Interpretasi: Semakin besar jumlah atlet berprestasi, merepresentasikan semakin besar peningkatan prestasi olahraga	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga	Bidang Olahraga Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga
	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kemasyarakatan pemuda	Persentase partisipasi organisasi kepemudaan yang aktif (%)	Mengukur partisipasi organisasi kepemudaan yang aktif	Formulasi Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda yang aktif}}{\text{Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda yang terdaftar}} \times 100\%$ Interpretasi: Semakin besar jumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda yang aktif, merepresentasikan semakin besar partisipasi organisasi kepemudaan yang aktif	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga	Bidang Kepemudaan Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga

16. DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan serta penugasan urusan keistimewaan kebudayaan

Indikator Kinerja Utama :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Pengembangan ragam budaya berbasis pemberdayaan Masyarakat		Indeks Pelestarian Budaya (IPB) (Angka)	Indeks Pelestarian Budaya digunakan untuk mengukur pengembangan ragam budaya berbasis pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Gunungkidul	Formulasi Perhitungan: Indeks Pelestarian Budaya dihitung dengan pembobotan dari unsur: 1. Jumlah <i>event</i> kebudayaan dengan bobot 40%; 2. Jumlah Dokumen sejarah, legenda, mitos dan cerita rakyat Gunungkidul dengan bobot 20%; 3. Jumlah obyek warisan budaya yang direkomendasikan menjadi cagar budaya dengan bobot 20%; dan 4. Persentase kalurahan kantong budaya yang menjadi kalurahan rintisan budaya dengan bobot 20%. Interpretasi: Indeks Pelestarian Budaya merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai peningkatan Pelestarian Budaya terhadap pengembangan ragam budaya berbasis pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Gunungkidul baik dalam penyelenggaraan <i>event</i>, pengarsipan dokumen-dokumen sejarah, pelestarian obyek wisata/ cagar budaya, dan pendataan kalurahan rintisan budaya. Semakin tinggi Indeks Pelestarian Budaya maka semakin besar pula pengembangan ragam budaya berbasis pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Gunungkidul	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Terwujudnya pemanfaatan ragam budaya berbasis masyarakat dalam rangka peningkatan pelestarian budaya dan kesejahteraan warga	Persentase penyusunan dokumen sejarah, legenda, mitos dan cerita rakyat Gunungkidul (%)	Persentase penyusunan dokumen sejarah, legenda, mitos dan cerita rakyat Gunungkidul merupakan angka yang mengukur pertumbuhan atau peningkatan penyusunan dokumen sejarah, legenda, mitos dan cerita rakyat Gunungkidul dalam suatu periode dibandingkan dengan target penyusunan sejarah, legenda, mitos dan cerita rakyat Gunungkidul pada periode tertentu yang dinyatakan dalam bentuk persen.	Formulasi Perhitungan: : $\frac{\text{Realisasi dokumen sejarah, legenda, mitos dan cerita rakyat Gunungkidul yang disusun}}{\text{Target dokumen sejarah, legenda, mitos dan cerita rakyat Gunungkidul yang disusun}} \times 100\%$ Interpretasi: Semakin tinggi persentase dokumen sejarah, legenda, mitos dan cerita rakyat Gunungkidul yang telah disusun, menggambarkan peningkatan pelestarian sejarah, legenda, mitos dan cerita rakyat Gunungkidul baik dalam pengembangan, pemanfaatan kepentingan dokumen sejarah, legenda, mitos, dan cerita rakyat, dengan tetap memperhatikan nilai sejarah untuk masa kini maupun masa depan	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Bidang Sejarah, Bahasa, Sastra, dan Permuseuman
		Persentase objek warisan budaya yang direkomendasikan menjadi cagar budaya (%)	Mengukur tersusunnya dokumen objek warisan budaya yang direkomendasikan menjadi cagar budaya yang telah disusun dibandingkan dengan	Formulasi Perhitungan: $\frac{\text{Realisasi objek warisan budaya yang direkomendasikan menjadi cagar budaya}}{\text{Target objek warisan budaya yang direkomendasikan menjadi cagar budaya}} \times 100\%$		Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Bidang Warisan Budaya

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			target penyusunan objek warisan budaya yang direkomendasikan menjadi cagar budaya pada periode tertentu	Interpretasi: Semakin tinggi persentase objek warisan budaya yang direkomendasikan menjadi cagar budaya menggambarkan semakin tinggi tingkat pelestarian warisan budaya yang terlindungi , dikembangkan, dan pemanfaatan kepentingan cagar budaya dengan tetap memperhatikan nilai-nilai sejarah baik dimasa kini maupun di masa depan		
		Persentase penyelenggaraan <i>event</i> kebudayaan (%)	Mengukur terlaksananya penyelenggaraan event kebudayaan dibandingkan dengan target penyelenggaraan <i>event</i> kebudayaan pada periode tertentu	Formulasi Perhitungan: $\frac{\text{Realisasi penyelenggaraan event kebudayaan}}{\text{Target penyelenggaraan event kebudayaan}} \times 100\%$ Interpretasi: Semakin tinggi persentase realisasi pelaksanaan <i>event</i> kebudayaan, merepresentasikan semakin baik capaian target penyelenggaraan kegiatan yang telah direncanakan.	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya, dan Seni dan UPT Taman Budaya Gunungkidul

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Persentase kalurahan kantong budaya yang menjadi kalurahan rintisan budaya (%)	Mengukur peningkatan persentase kalurahan kantong budaya yang naik status menjadi kalurahan rintisan budaya pada periode tertentu	Formulasi Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah kalurahan kantong budaya yang menjadi kalurahan rintisan budaya}}{\text{Jumlah kalurahan kantong budaya}} \times 100\%$ Interpretasi: Semakin banyak kalurahan kantong budaya yang bertransformasi menjadi kalurahan rintisan budaya, merepresentasikan semakin tinggi jumlah kalurahan di Kabupaten Gunungkidul yang mengalami peningkatan status dalam rangka penguatan identitas budaya.	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya, dan Seni

17. DINAS PERHUBUNGAN

Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perhubungan
Indikator Kinerja Utama :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya konektivitas daerah		Rasio konektivitas kabupaten/kota (%)	Mengukur rasio konektivitas Kabupaten/Kota, mengetahui tingkat konektivitas jaringan transportasi darat di wilayah kewenangan kabupaten/kota	Formulasi Perhitungan: $\frac{\text{jumlah trayek yang dilayani} \times \text{bobot trayek}}{\text{jumlah kebutuhan trayek}}$ Interpretasi: Semakin tinggi rasionya semakin baik konektivitas kabupaten, semakin mudah aksesibilitas dan mobilitas penduduk dan barang	Dinas Perhubungan Bidang Angkutan dan Terminal	Bidang Angkutan dan Terminal
	Meningkatnya layanan transportasi yang berkualitas	Indeks layanan transportasi (Indeks)	Indeks layanan transportasi yang digunakan untuk menilai kinerja dan kualitas layanan transportasi yang diperoleh dari komposit pembobotan capaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan	Formulasi Perhitungan: = (Persentase pelanggaran yang berhasil ditindak x 15%) + (Persentase tingkat ketaatan perijinan angkutan umum x 10%)+(Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C x 25%)+(Persentase ketersediaan fasilitas dan perlengkapan jalan x 35%)+(Persentase kendaraan yang melakukan uji laik jalan x 15%) Interpretsi: Semakin tinggi nilai indeks maka semakin baik kinerja dan kualitas layanan transportasi kepada masyarakat	Dinas Perhubungan	Bidang Lalu lintas, Bidang PJU dan Perparkiran, Bidang Angkutan dan Terminal, UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

18. DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Tugas Pokok : Mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang perdagangan tenaga kerja dan transmigrasi

Indikator Kinerja Utama :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Terwujudnya daya saing sektor perdagangan dan tenaga kerja	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Indeks daya saing sektor perdagangan dan tenaga kerja (Indeks)	Mengukur kinerja perdagangan dan tenaga kerja di Kabupaten Gunungkidul	Formulasi Perhitungan: (Rasio PDRB Sektor Perdagangan x 50%) + (Persentase tenaga kerja yang ditempatkan x 50%) Interpretasi: Semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi daya saing sektor perdagangan dan tenaga kerja	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	BPS, Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		PDRB Sektor Perdagangan (Persen)	Proporsi PDRB Perdagangan adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang meliputi: 1. Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya, dan 2. Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor.	Formulasi Perhitungan: Nilai tambah Perdagangan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di Kabupaten Gunungkidul dibagi dengan nilai PDRB Kabupaten dikalikan 100% Interpretasi: Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh aktivitas terkait perdagangan, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB regional, <i>ceteris paribus</i> .	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	BPS

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (Persen)	Mengukur persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan Luar Negeri) melalui mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota dengan membandingkan antara jumlah pencari kerja yang wajib melaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab bahwa telah diterima bekerja dan ditempatkan di dalam maupun di luar negeri dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar yaitu pencari kerja yang mendaftar sebagai pencari kerja di wilayah kabupaten/kota	Formulasi Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah pencari kerja yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencari kerja yang terdaftar}} \times 100\%$ Interpretasi: Semakin tinggi nilai semakin tinggi tenaga kerja yang ditempatkan	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Bidang Tenaga Kerja, Disdagnaker

19. DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perindustrian, koperasi, dan usaha kecil, dan menengah

Indikator Kinerja Utama :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Terwujudnya nilai tambah sektor Perindustrian, Koperasi dan UKM		Indeks nilai tambah sektor Perindustrian, Koperasi dan UKM (Indeks)	Mengukur kontribusi kinerja sektor perindustrian, koperasi, dan kewirausahaan UMKM dalam menciptakan nilai tambah ekonomi terhadap perekonomian suatu daerah. Indeks ini disusun sebagai indikator komposit dari tiga indikator turunan, masing-masing mencerminkan pilar utama penciptaan nilai tambah ekonomi lokal: 1. Kontribusi industri pengolahan, 2. Aktivitas usaha koperasi, 3. Tingkat kewirausahaan Masyarakat.	Formulasi Perhitungan: $= (Wi \times Si) + (Wk \times Sk) + (Wu \times Su)$ Ket: Wi = Sektor industri Wk = Bobot sektor koperasi Wu = Bobot sektor UMKM Si = Skor sektor industri (hasil normalisasi) Sk = Skor sektor koperasi (hasil normalisasi) Su = Skor sektor UMKM (hasil normalisasi) Interpretasi : Indeks dinyatakan dalam skala 0–100, dihitung berdasarkan hasil normalisasi masing-masing sektor dikali bobot per sektor. Hasil normalisasi masing-masing sektor diukur dengan membandingkan nilai minimum tahun n (berjalan) dengan nilai maksimum tahun 2030 dari setiap indikator turunan. Sedangkan Bobot Industri 40%, Koperasi 30%, dan UMKM sebesar 30%.	Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil, dan Menengah	Laporan Tahunan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Meningkatnya Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDRB ADHB	Formulasi Perhitungan: Rumus: $\frac{\text{Nilai Tambah sektor Industri pengolahan}}{\text{Nilai PDRB ADHB Kabupaten}} \times 100\%$ Interpretasi: Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah, <i>ceteris paribus</i>.	Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil, dan Menengah	BPS
	Meningkatnya volume usaha koperasi	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB ADHB masing-masing daerah. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah	Formulasi Perhitungan: $\frac{\text{Volume Usaha Koperasi Daerah}}{\text{Nilai PDRB ADHB Kabupaten}} \times 100\%$ Interpretasi : Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut.	Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil, dan Menengah	Laporan Tahunan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Nilai PDRB ADHB diperoleh dari rilis BPS.			
	Meningkatnya rasio kewirausahaan	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.	Formulasi Perhitungan: Rumus: $\frac{\text{Berwirausaha dibantu buruh tetap Daerah}}{\text{Total Angkatan Kerja Daerah}} \times 100\%$ Interpretasi: Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha.	Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil, dan Meengah	BPS

20. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Indikator Kinerja Utama :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA										
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan yang baik, Pengendalian Angka Kelahiran dan Pembangunan Keluarga		Indeks Desa (Indeks)	Indeks desa memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi desa, yang mencakup berbagai aspek layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan tata kelola pemerintahan desa. Indeks desa adalah sebuah indikator tunggal yang digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan dan kemandirian desa di Indonesia.	Formulasi Perhitungan: Indeks desa didapatkan berdasarkan hasil penilaian enam indikator (layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan tata kelola pemerintahan desa), yang dirilis oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Indeks desa memiliki kriteria sebagai berikut:<table><tr><td>Mandiri</td><td>79,63% ≤ ID ≤ 100%</td></tr><tr><td>Maju</td><td>69,35% ≤ ID ≤ 79,62%</td></tr><tr><td>Berkembang</td><td>57,39% ≤ ID ≤ 69,34%</td></tr><tr><td>Tertinggal</td><td>49,49% ≤ ID ≤ 57,38%</td></tr><tr><td>Sangat Tertinggal</td><td>0% ≤ ID ≤ 49,48%</td></tr></table> Interpretasi: Indeks desa bernilai antara 0 - 1 dan bermakna positif. Nilai Indeks desa yang semakin tinggi menunjukkan tingkat kemajuan dan kemandirian desa semakin baik.	Mandiri	79,63% ≤ ID ≤ 100%	Maju	69,35% ≤ ID ≤ 79,62%	Berkembang	57,39% ≤ ID ≤ 69,34%	Tertinggal	49,49% ≤ ID ≤ 57,38%	Sangat Tertinggal	0% ≤ ID ≤ 49,48%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Hasil Penilaian yang dirilis oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Mandiri	79,63% ≤ ID ≤ 100%															
Maju	69,35% ≤ ID ≤ 79,62%															
Berkembang	57,39% ≤ ID ≤ 69,34%															
Tertinggal	49,49% ≤ ID ≤ 57,38%															
Sangat Tertinggal	0% ≤ ID ≤ 49,48%															

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		TFR (Angka Kelahiran Total) (Jiwa)	Mengukur angka kelahiran total (<i>Total Fertility Rate</i>)	Formulasi Perhitungan: Rumus: $\frac{\text{Banyaknya kelahiran perempuan umur 15-49 tahun selama periode tertentu}}{\text{Jumlah penduduk perempuan usia 15-49 tahun pada periode yang sama}} \times 100\%$ Interpretasi: TFR sebesar 2,1 dianggap sebagai batas penggantian populasi. Artinya, jika TFR sama dengan atau lebih tinggi dari 2,1, maka populasi tersebut cenderung stabil atau tumbuh. Jika TFR di bawah 2,1, maka populasi cenderung menyusut	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Data TFR yang dirilis pada tahun tersebut oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
	Akuntabilitas pemerintahan kalurahan meningkat	Persentase Kalurahan yang Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPKal) Tepat Waktu (%)	Mengukur Ketepatan waktu kalurahan dalam menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPKal)	Formulasi Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah Kalurahan yang menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPKal) tepat waktu}}{\text{Jumlah Kalurahan seluruhnya}} \times 100\%$ Interpretasi: Semakin tinggi capaiannya, menunjukkan semakin banyak kalurahan yang telah menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPKal) tepat waktu	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Pemberdayaan masyarakat Meningkat	Persentase Desa Mandiri (%)	Mengukur persentase kalurahan berstatus mandiri di Kabupaten Gunungkidul	Formulasi Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah kalurahan berstatus mandiri}}{\text{Jumlah Kalurahan seluruhnya}} \times 100\%$ Interpretasi: Semakin tinggi persentase desa mandiri, menunjukkan semakin banyak desa berstatus mandiri di Kabupaten Gunungkidul	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalia Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Meningkatnya Kepesertaan KB pada PUS	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>) (%)	Mengukur tingkat pemakaian kontrasepsi modern	Formulasi Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah peserta KB Aktif Modern}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$ Interpretasi: Semakin tinggi mCPR, menunjukkan semakin banyak pasangan usian subur yang menggunakan alat konrasepsi modern	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalia Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Meningkatnya keaktifan kelompok kegiatan ketahanan keluarga	Persentase Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga yang Aktif Melaksanakan Kegiatan (%)	Mengukur keaktifan kelompok kegiatan ketahanan keluarga, yang terdiri dari Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor	Formulasi Perhitungan: Rumus: $\frac{\text{Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga yang Aktif Melaksanakan Kegiatan}}{\text{Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga seluruhnya}} \times 100\%$ Interpretasi: Semakin tinggi capaiannya, menunjukkan semakin banyak Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga yang Aktif Melaksanakan Kegiatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalia Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

21. DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pertanian, selain sub bidang peternakan dan sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, dan urusan pemerintahan bidang pangan

Indikator Kinerja Utama :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya pembangunan pertanian dan ketahanan pangan		Nilai PDRB ADHK pertanian sub kategori tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan (Rp)	Nilai PDRB ADHK dalam Rp mencerminkan kontribusi riil (nyata) subkategori pertanian terhadap perekonomian regional, setelah disesuaikan dengan harga konstan	Formulasi Perhitungan: PDRB ADHK Pertanian = Jumlah Nilai Tambah Bruto (GVA) Sektor Pertanian (Harga Konstan) Interpretasi: Semakin tinggi PDRB ADHK pertanian, berarti volume produksi komoditas pertanian (seperti tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) meningkat secara nyata dari periode sebelumnya Pertumbuhan Riil: Jika PDRB ADHK salah satu sub kategori meningkat dari tahun sebelumnya, berarti ada peningkatan produksi fisik riil (bukan karena kenaikan harga), menunjukkan efisiensi atau ekspansi sektor Perbandingan dan Kebijakan: Nilai rendah pada salah satu sub kategori bisa menandakan ketergantungan pada impor atau kendala seperti serangan OPT/ penyakit hewan, sehingga perlu intervensi kebijakan	Dinas Pertanian dan Pangan	Badan Pusat Statistik (BPS)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Menurunnya Ketidacukupan Pangan	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	Mengidentifikasi seberapa banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan di bawah standar kecukupan energi yang direkomendasikan. Semakin tinggi nilai PoU mengidentifikasikan semakin banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya.	Formulasi Perhitungan: Rumus PoU adalah: $PoU = \int_{-x}^{MDER} f(E) dE$ Keterangan: PoU : Proporsi populasi yang mengalami ketidacukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER) yang diukur dengan kkal. MDER : Kebutuhan Minimum Energi yang diukur dengan kkal (<i>Minimum Dietary Energy Requirement</i>). f(x) : Fungsi kepadatan probabilitas tingkat konsumsi kalori umumnya sehari-hari untuk rata-rata per kapita individu dalam suatu populasi tertentu Interpretasi: Semakin tinggi nilai Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>/PoU) mengidentifikasikan semakin banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya.	Dinas Pertanian dan Pangan	Badan Pusat Statistik (BPS)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Meningkatnya produksi pertanian	Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Ton)	Jumlah total produksi tanaman pangan + hortikultura + perkebunan pada tahun ke n	Formulasi Perhitungan: Angka komulatif produksi tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, ubikayu) + tanaman hortikultura (cabe, bawang merah, pisang, durian, alpukat, mangga) + tanaman perkebunan (kakao, mete, tembakau, kelapa) dalam setahun Interpretasi: Semakin tinggi produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan di suatu wilayah maka berpotensi surplus pangan, menunjukkan ketersediaan pangan yang baik, dan ketahanan pangan meningkat	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah Produksi daging (Ton)	Jumlah produksi daging pada tahun ke n	Formulasi Perhitungan: Angka komulatif produksi laporan statistik peternakan untuk daging sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, itik, babi pada tahun ke n Interpretasi: Semakin tinggi produksi daging, maka semakin banyak ketersediaan daging untuk memenuhi permintaan lokal dan regional	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah produksi telur (Ton)	Jumlah produksi telur pada tahun ke n	Formulasi Perhitungan: Angka komulatif produksi laporan statistik peternakan untuk telur ayam buras, ayam ras petelur, telur itik dan telur puyuh pada tahun ke n Interpretasi: Semakin tinggi produksi daging, maka semakin banyak ketersediaan telur untuk memenuhi permintaan lokal dan regional	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Meningkatnya pelayanan kesehatan hewan	Presentase penanganan kasus penyakit hewan menular (%)	Perbandingan antara jumlah kasus penyakit hewan menular yang ditangani dengan jumlah kasus penyakit yang terlapor	Formulasi Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah kasus penyakit hewan menular yang ditangani}}{\text{jumlah kasus penyakit yang terlapor}} \times 100\%$ Interpretasi: Semakin tinggi persentase menunjukkan penanganan kasus penyakit hewan menular semakin meningkat	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan

22. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja Utama :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan menuju kemandirian ekonomi daerah		Nilai Produksi Perikanan (Rupiah)	Mengukur nilai produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan	Formulasi Perhitungan: $\{(\text{Total Produksi perikanan Tangkap (Kg) X Rerata Harga Komoditas Perikanan Tangkap(Rp/Kg) }\} + \{(\text{Total Produksi Perikanan Budidaya (Kg) X Rerata Harga Komoditas Perikanan Budidaya (Rp/Kg) }\} + \{(\text{Total Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (Kg) x Rerata Harga Komoditas Pengolahan Hasil Perikanan (Rp/Kg)}\}$ Interpretasi : Total nilai ekonomi yang dihasilkan dari kegiatan sektor perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan Semakin tinggi nilai produksi perikanan menunjukkan nilai ekonomi yang dihasilkan dari kegiatan sektor perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan meningkat	Dinas Kelautan dan Perikanan	Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Pendapatan masyarakat perikanan meningkat	Pendapatan Per Kapita Masyarakat Perikanan (Rp)	Mengukur pendapatan perkapita masyarakat perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengolah hasil perikanan	Formulasi Perhitungan: $\{(\text{Nilai Produksi Perikanan Tangkap-Biaya Operasional}) / \text{Jumlah Nelayan} \} + \{ (\text{Nilai Produksi Perikanan Budidaya-Biaya Operasional}) / \text{Jumlah Pembudidaya Ikan} \} + \{ (\text{Nilai Produksi Pengolahan Hasil Perikanan-Biaya Operasional}) / \text{Jumlah Pengolah Hasil Perikanan} \}$ Interpretasi : Menunjukan ukuran pendapatan rata-rata yang dihasilkan dari kegiatan perikanan, baik itu dari sektor perikanan tangkap, perikanan budidaya maupun pengolahan hasil perikanan Semakin tinggi pendapatan rata-rata yang dihasilkan dari kegiatan perikanan, baik itu dari sektor perikanan tangkap, perikanan budidaya maupun pengolahan hasil perikanan menunjukkan pendapatan per kapita masyarakat perikanan semakin meningkat	Dinas Kelautan dan Perikanan	Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan

23. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Tugas Pokok : Melaksanakan urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang lingkungan hidup
Indikator Kinerja Utama :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Lestari		Persentase Kenaikan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (%)	Mengukur persentase kenaikan IKLH tahun berjalan dibandingkan tahun sebelumnya	Formulasi Perhitungan: $\frac{\text{Nilai IKLH tahun } n - \text{Nilai IKLH tahun } n-1}{\text{Nilai IKLH tahun } n-1} \times 100\%$ Interpretasi: Semakin besar nilai yang dihasilkan maka semakin baik nilai capaian IKLH dan semakin baik kualitas lingkungan hidupnya	Dinas Lingkungan Hidup	Kementerian Lingkungan Hidup
	Meningkatnya Upaya Pencegahan, Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	Mengukur kualitas air di kawasan wilayah Kabupaten Gunungkidul dalam kurun waktu satu tahun berjalan.	Formulasi Perhitungan: Penghitungan dengan aplikasi SITALA, nilai yang didapat dari rapor KLH Rumus IKA Titik Pantau = $\sum_i^n W_i I_i$ W = Faktor pembobot I = sub-indeks (Q-Nilai) Interpretasi: Semakin tinggi nilai IKA yang dicapai, semakin baik kualitas airnya	Dinas Lingkungan Hidup	Kementerian Lingkungan Hidup

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Indeks Kualitas Udara (Indeks)	Mengukur kualitas udara di kawasan wilayah Kabupaten Gunungkidul dalam kurun waktu satu tahun berjalan.	Formulasi Perhitungan: Penghitungan dengan aplikasi SITALA, nilai yang didapat dari rapor KLH. Dengan rumus: $IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,99} (I_{INA} - 0,01) \right)$ $I_{INA} = \frac{(Indeks\ NO_2 + Indeks\ SO_2 + Indeks\ PM_{2.5})}{3}$ $Indeks\ NO_2 = \frac{Konsentrasi\ Rata - rata\ Tahunan\ NO_2}{Baku\ Mutu\ Udara\ Ambien\ Tahunan\ NO_2}$ $Indeks\ SO_2 = \frac{Konsentrasi\ Rata - rata\ Tahunan\ SO_2}{Baku\ Mutu\ Udara\ Ambien\ Tahunan\ SO_2}$ $Indeks\ PM_{2.5} = \frac{Konsentrasi\ Rata - rata\ Tahunan\ PM_{2.5}}{Baku\ Mutu\ Udara\ Ambien\ Tahunan\ PM_{2.5}}$ Interpretasi: Semakin baik nilai IKU yang dicapai, semakin baik kualitas udaranya	Dinas Lingkungan Hidup	Kementerian Lingkungan Hidup

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Indeks Kualitas Lahan (Indeks)	Mengukur kualitas lahan di kawasan wilayah Kabupaten Gunungkidul dalam kurun waktu satu tahun berjalan.	Formulasi Perhitungan: Penghitungan dengan aplikasi SITALA, nilai yang didapat dari rapor KLH (Rumus) $IKL = IKTL + \text{Faktor Koreksi Gambut}$ $IKTL = 100 - [84,3 - (TL \times 100)] \times \frac{50}{54,3}$ $TL = \frac{\sum_{i=1}^{23} ((\text{Luas Kelas Tutupan}_i \times C_i))}{\sum_{i=1}^{23} (\text{Luas Kelas Tutupan}_i)}$ Dimana; IKTL : Indeks KualitasTutupan Lahan TL : Tutupan Lahan yang di hitung dengan rumus; Interpretasi: Semakin baik nilai IKL yang dicapai, semakin baik kualitas lahannya	Dinas Lingkungan Hidup	Kementerian Lingkungan Hidup

24. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perpustakaan dan kearsipan
Indikator Kinerja Utama :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Terwujudnya peningkatan literasi masyarakat dan peningkatan kearsipan yang berkualitas		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Indeks)	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah ukuran untuk memetakan kondisi pembangunan literasi daerah berdasarkan data faktual dan verifikasi, yang menitikberatkan pada aspek kewenangan pemerintah daerah dalam urusan perpustakaan melalui dimensi kinerja dan kepatuhan.	Formulasi Perhitungan: (Dimensi Kinerja × 70%) + (Dimensi Kepatuhan × 30%) Keterangan: 1. Dimensi Kinerja (bobot 70%) Mencakup layanan (Pemanfaatan koleksi, kunjungan fisik/daring, kegiatan literasi) dan pengelolaan (Kolaborasi, variasi layanan, dokumen kebijakan). 2. Dimensi Kepatuhan (bobot 30%) Mencakup koleksi (Jumlah & penambahan tercetak/elektronik) dan SDM (Kualifikasi pustakawan, tenaga teknis, anggaran diklat). Interpretasi: Semakin tinggi nilai IPLM, semakin baik potret riil pembangunan literasi di daerah berdasarkan capaian kinerja layanan dan kepatuhan terhadap standar pengelolaan perpustakaan sesuai kewenangan daerah.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Laporan Hasil Pengukuran IPLM Nasional (Perpustakaan Nasional Republik Indonesia)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintah Daerah (Indeks)	Indeks nilai pengawasan kearsipan adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja pengelolaan arsip dan penyelenggaraan kearsipan dengan bobot tertentu pada masing-masing aspek	Formulasi Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah nilai pengawasan arsip seluruh PD}}{\text{Jumlah PD}}$ Interpretasi: Semakin tinggi nilai pengawasan kearsipan maka semakin berkualitas dalam pengelolaan arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Terwujudnya peningkatan kegemaran membaca di masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (Nilai)	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) adalah ukuran perilaku dan budaya literasi masyarakat yang diukur melalui pendekatan siklus membaca, mencakup kondisi psikologis, aktivitas saat membaca, hingga dampak sosial-kognitif yang dihasilkan.	Formulasi Perhitungan: $\text{TKM} = (\text{Pra Membaca} \times 15\%) + (\text{Saat Membaca} \times 50\%) + (\text{Pasca Membaca} \times 35\%)$ Keterangan 1. Pra Membaca (bobot 15%): Motivasi, akses bahan bacaan, pengaruh lingkungan/sosial, budaya literasi. 2. Saat Membaca (bobot 50%): Perilaku membaca (strategi pemahaman, interaksi teks) dan literasi sosial (diskusi, kolaborasi). 3. Pasca Membaca (bobot 35%): Dampak membaca (perkembangan kognitif, sosial, emosional) dan nilai manfaat (Value Theory). Interpretasi: Semakin tinggi nilai TKM, semakin kuat budaya baca masyarakat yang diukur secara substansial mulai dari minat, proses pemahaman mendalam, hingga dampak nyata bacaan terhadap kualitas hidup.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Laporan Hasil Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) Nasional dari Perpustakaan Nasional RI

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Kesesuaian pengelolaan arsip daerah secara baku	Persentase Penerapan Pengelolaan Arsip secara Baku (%)	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan)	Perangkat Daerah yang melakukan pengelolaan arsip dengan benar mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan didukung adanya arsiparis dan pengelolaan arsip serta sarana kearsipan Formulasi Perhitungan: $\frac{\sum \text{Perangkat Daerah yang melakukan pengelolaan arsip secara baku}}{\sum \text{Perangkat Daerah}} \times 100\%$ Interpretasi: Semakin tinggi tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional maka kualitas layanan arsip meningkat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Laporan Hasil Monev Kearsipan DPK

25. DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)

Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan dan Urusan Keistimewaan serta Tugas Pembantuan di bidang pertanahan dan tata ruang

Indikator Kinerja Utama :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya tata kelola pertanahan dan penyelenggaraan penataan ruang		Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pertanahan (%)	Menunjukkan tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam pengelolaan pertanahan serta penataan ruang sesuai dengan target yang telah ditetapkan.	Formulasi Perhitungan: Rata Rata Capaian Kinerja Urusan Pertanahan dan Tata Ruang $\frac{\text{Persentase Tertib Administrasi Pertanahan} + \text{Persentase Kesesuaian Tata Ruang terhadap RTRW}}{2}$ Interpretasi: Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pertanahan diperoleh dari mengambil rata-rata dari indikator tertib admnistrasi pertanahan dan kesesuaian tata ruang terhadap RTRW	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana]	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana]
	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan pertanahan	Persentase Tertib Administrasi Pertanahan	Indikator ini mengukur sejauh mana data, dokumen, dan proses administrasi pertanahan telah tertata dengan baik, akurat, dan terdokumentasi secara lengkap.	Formulasi Perhitungan: (30%Persentase Penatagunaan Tanah Tertangani)+ (30% Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi) + (20%Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan) + (10%Persentase Kinerja Fasilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa sesuai dengan Ketentuan Bidang Pengendalian dan Pengawasan) + (10% Presentase kinerja Fasilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kas Desa sesuai dengan ketentuan di Bidang Pertanahan) x 100	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana]	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana]

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				Interpretasi: Merupakan penjumlahan dari 5 <i>outcome</i> urusan pertanahan Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin tingginya tertib administrasi pertanahan		
	Meningkatnya kepatuhan pemanfaatan ruang terhadap RTRW	Persentase kesesuaian tata ruang terhadap RTRW (Persen)	Indikator ini menggambarkan tingkat kesesuaian antara pemanfaatan ruang yang terjadi di wilayah dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan	Formulasi Perhitungan: Berdasarkan Permen ATR 21/2021, perwujudan RTR menyandingkan <i>existing</i> dengan rencana pola ruang yang ada di dalam RTRW terbaru. $\frac{\sum \text{Luasan Kesesuaian Pola Ruang}}{\sum \text{Luasan Rencana Pola Ruang}} \times 100\%$ Interpretasi: Kesesuaian Pola Ruang merupakan data existing yang ada di lapangan berdasarkan penggunaan lahan di kabupaten gunungkidul, sehingga kesesuaian dapat terlihat ketika di sandingan dengan RTRW yang sudah dimiliki	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana]	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana</i>]

26. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Tugas Pokok : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Serta Tugas Pembantuan Dibidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Indikator Kinerja Utama :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif		Persentase Peningkatan Investasi Kabupaten/Kota (%)	Persentase Peningkatan Investasi Kabupaten/Kota merupakan angka yang mengukur selisih antara nilai realisasi investasi tahun tertentu (tahun n) terhadap nilai realisasi investasi tahun sebelumnya (tahun n-1) yang dinyatakan dalam satuan persen.	Formulasi Perhitungan: $\frac{\sum \text{Nilai Realisasi Investasi Tahun (n)} - \sum \text{Nilai Realisasi Investasi Tahun (n-1)}}{\sum \text{Nilai Realisasi Investasi Tahun (n-1)}} \times 100\%$ Interpretasi: Semakin besar nilai persentase peningkatan investasi pada periode (Tahun n) dibandingkan dengan periode (Tahun n-1) maka menunjukkan peningkatan iklim investasi yang dapat diartikan : 1. Iklim usaha yang kondusif atau membaik, karena adanya kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya pada suatu kawasan yang dinilai potensial. 2. Peningkatan ketersediaan lapangan kerja serta penyerapan tenaga kerja. 3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena investasi akan mendorong peningkatan produksi, infrastruktur serta inovasi.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dirilis oleh BKPM dan Online Single Submission (OSS).

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan (Indeks)	Nilai IKM diperoleh dari pengolahan data Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara online yang dilakukan periodik dengan target responden masyarakat sebagai pengguna layanan perizinan dan non perizinan.	Formulasi Perhitungan: $\frac{(\sum \text{Nilai Persepsi Per Unsur}}{\sum \text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ Interpretasi: Nilai IKM yang telah dikonversi berada dalam rentang 25 hingga 100. Semakin tinggi nilainya, semakin baik mutu pelayanan yang diberikan. Interval nilai IKM: 25,00 - 64,99 Mutu D Kinerja Tidak Baik 65,00 - 76,60 Mutu C Kinerja Kurang Baik 76,61 - 88,30 Mutu B Kinerja Baik 88,31 - 100,00 Mutu A Kinerja Sangat Baik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul terhadap pengguna layanan perizinan.
	Meningkatnya Realisasi Investasi di Kabupaten Gunungkidul	Realisasi Investasi di Kabupaten Gunungkidul (Rupiah)	Nilai Realisasi Investasi merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.	Formulasi Perhitungan: $\sum \text{Nilai Realisasi Investasi Kabupaten Gunungkidul Tahun (n)}$ Interpretasi: Semakin besar nilai investasi maka menunjukkan semakin besar potensi pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Kabupaten Gunungkidul.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dirilis oleh BKPM dan Online Single Submission (OSS).

27. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan, dan perlindungan masyarakat

Indikator Kinerja Utama :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya Ketenteraman Dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat		Indeks Penyelenggaraan Trantibum Linmas (Indeks)	Mengukur jumlah warga yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	Formulasi Perhitungan: $\frac{\sum \text{Persentase penyelesaian pelanggaran K3} + \text{Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan}}{2} \times 100$	Satuan Polisi Pamong Praja	Laporan Tahunan Satpol PP
	Penyelenggaraan pelanggaran K3 serta penegakan perda dan perkada meningkat	Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (%)	Menghitung penyelesaian pelanggaran K3	Formulasi Perhitungan: $\frac{\sum \text{pelanggaran K3 Terselesaikan}}{\sum \text{pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Sat Pol PP}} \times 100\%$ Interpretasi: Mengukur jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan oleh masyarakat dan telah teridentifikasi/terselesaikan	Satuan Polisi Pamong Praja	Laporan Tahunan Satpol PP
		Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan (%)	Menghitung pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan	Formulasi Perhitungan: $\frac{\sum \text{penyelesaian pelanggaran peraturan daerah}}{\sum \text{pelanggaran peraturan daerah}} \times 100\%$ Interpretasi: Mengukur jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang dilaporkan dan telah terselesaikan	Satuan Polisi Pamong Praja	Laporan Tahunan Satpol PP

28. KAPANEWON

Tugas Pokok : Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon.

Indikator Kinerja Utama :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas		Indeks Pelayanan Kapanewon (Indeks)	Mengukur kinerja kapanewon dibidang pelayanan umum, sosial, ketenteraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat serta koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kalurahan	Formulasi Perhitungan: Nilai gabungan yang diperoleh dari rata-rata berbobot lima komponen penilaian yaitu: {(20% x persentase penyusunan APBkal benar dan tepat waktu) + (20% x persentase penyusunan RKPKal benar dan tepat waktu)+ (20% x persentase kegiatan sosial terlaksana) + (20% x persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum) + (20% x nilai indeks kepuasan masyarakat)} Interpretasi: Semakin tinggi nilai menunjukan kinerja kapanewon semakin baik.	Kapanewon	Laporan Tahunan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Meningkatnya efektivitas peran kapanewon dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di kalurahan	Persentase Penyusunan RKPKal Benar dan Tepat Waktu (%)	Persentase kalurahan yang menyusun RKPKal sesuai dengan peraturan yang berlaku dan ditetapkan paling lambat bulan September Tahun n-1	Formulasi Perhitungan: (Jumlah kalurahan yang menetapkan RKPKal benar dan tepat waktu / jumlah kalurahan di wilayah kapanewon) × 100% Interpretasi: Semakin tinggi nilai menunjukkan semakin konsistennya kalurahan dalam menyusun RKPKal yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Kapanewon	Laporan Tahunan
		Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu (%)	Persentase kalurahan yang menyusun APBKal sesuai dengan peraturan yang berlaku dan ditetapkan paling lambat bulan Desember Tahun n-1	Formulasi Perhitungan: (Jumlah kalurahan yang menetapkan APBKal benar dan tepat waktu / jumlah kalurahan di wilayah kapanewon) × 100% Interpretasi: Semakin tinggi nilai menunjukkan semakin konsistennya kalurahan dalam menyusun APBKal yang tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku	Kapanewon	Kapanewon

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Persentase Kegiatan Sosial (%)	Persentase terlaksananya kegiatan sosial antara lain pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan di bidang kebudayaan, kesenian, keolahragaan, keagamaan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial	Formulasi Perhitungan: (Jumlah kegiatan sosial yang terlaksana/ Jumlah kegiatan sosial yang direncanakan) x 100% Keterangan: Kegiatan sosial terdiri dari 15 komponen, yaitu: 1.Kelompok seni; 2.Stunting; 3.PMKS; 4.Hari jadi; 5.Kapanawon sehat; 6.Safari teraweh; 7.FKUB; 8.PKK; 9.Karang taruna; 10.Olah raga; 11.Bansos (bansos baik barang maupun uang / PIWK, teknokratis); 12.SID; 13.Monev KUBE; 14.KDRT; 15.Forum anak Asumsi: Jumlah kegiatan sosial disesuaikan dengan kemampuan masing-masing kapanewon, sehingga bisa tidak dilaksanakan sejumlah 15 komponen Interpretasi: Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan sosial yang dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon	Kapanewon

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kapanewon	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	Persentase terlaksananya ketenteraman dan ketertiban umum merupakan perwujudan kolaborasi dan koordinasi lintas sektor yang aktif dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana serta kepatuhan masyarakat terhadap peraturan di wilayah Kapanewon	Formulasi Perhitungan: (Jumlah koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum/total koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum) x 100% Koordinasi ketenteraman dan ketertiban dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu: 1. Kebencanaan : Alam dan Rumah Tangga 2. Kriminalitas 3. Penyakit Masyarakat 4. Gotong Royong Jika tidak ada kasus maka dianggap tertangani (100%) Interpretasi: Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa koordinasi ketenteraman dan ketertiban berlangsung secara konsisten dan sesuai target yang telah ditetapkan.	Kapanewon	Kapanewon

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	Hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon	Formulasi Perhitungan: Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada semester II yang diperoleh dengan melakukan survei kepada masyarakat pengguna layanan Interpretasi: Semakin tinggi nilai menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang baik terhadap pelayanan publik Kapanewon	Kapanewon	Kapanewon

BUPATI GUNUNGKIDUL,



ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH